

**LAPORAN PELAKSANAAN
PENERAPAN TATA KELOLA (GCG)
PT BPR INTIDANA SUKSES MAKMUR
TAHUN 2023**



**Jl. Tiang Bendera II No.92, RT.6/RW.3, Roa Malaka,
Kec. Tambora, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota
Jakarta 11230
TELEPON: (021) 6905369**



BAB I

PENJELASAN UMUM

Seiring dengan meluasnya pelayanan dan peningkatan volume usaha PT BPR Intidana Sukses Makmur (BPR) pada tahun 2023, dengan demikian meningkatkan risiko BPR, Sehingga mendorong kebutuhan terhadap penerapan tata kelola oleh Bank Perekonomian Rakyat yang mengacu kepada prinsip-prinsip yang sesuai dengan peraturan Otoritas.

Maka dalam rangka meningkatkan kinerja BPR serta melindungi para pemangku kepentingan (stakeholders) dan menunjang kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada Perbankan, maka berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat (sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/SEOJK.03/2020). Dimana penyusunan Tata Kelola BPR Intidana Sukses Makmur mengacu kepada prinsip-prinsip Keterbukaan (Transparency), Akuntabilitas (Accountability), Pertanggungjawaban (Responsibility), Independensi (Independency) dan Kewajaran (Fairness).

BPR Intidana Sukses Makmur secara berkelanjutan telah menerapkan tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance (GCG), dengan mengutamakan Good Corporate Governance (GCG) dan pengelolaan risiko yang baik, BPR diharapkan dapat terhindar dari permasalahan struktural yang berdampak pada kinerja bank yang akan dapat menyebabkan terganggunya kelangsungan usaha Bank bahkan dapat dicabut ijin usahanya. Hal ini disadari bahwa setiap keputusan bisnis dapat menimbulkan risiko, untuk itu BPR harus mengelola risiko melalui pengawasan yang efektif dan pengendalian internal yang merupakan bagian dari pelaksanaan prinsip GCG. BPR Intidana Sukses Makmur sudah menerapkan dan menjalankan Struktur pengendalian internal yang terpadu dan komprehensif dapat meminimalkan dampak tersebut.



BAB II

TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA BPR

A. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi		
1.	Nama	:	Polycarpus Feriyanto
	Jabatan	:	Direktur Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
Membawahi satuan kerja/pejabat eksekutif sebagai berikut yaitu : Satuan Kerja Analis Kredit, Satuan kerja Settlement,Recovery dan Litigation, Satuan Kerja Audit Internal Satuan Kerja Teknologi Informasi Satuan Kerja Human Resources dan General Administration dan GM Operasional yang membawahi Admin Kredit, Operasional, Accounting & Reporting. Bertanggung jawab terhadap seluruh arahan,strategi dan pengelolaan organisasi BPR, Memastikan bahwa seluruh aspek strategi, aktivitas, program, layanan, dan tata kelola BPR diimplementasikan berdasarkan kepentingan pemegang saham,nasabah,karyawan,dan masyarakat. Memberikan arahan dan petunjuk atas kebijakan bidang pendukung operasional dan layanan perbankan,teknologi informasi,sistem dan prosedur,aspek hukum,aspek finansial,dan sumber daya manusia. Mengelola kinerja keuangan, permodalan dan investasi strategis BPR, untuk mengoptimalkan profitabilitas, produktivitas dan Total Shareholders Return. Mengembangkan dan mengelola sistem informasi manajemen dan akuntansi serta kinerja BPR untuk dilaporkan kepada regulator serta dikomunikasikan kepada pemangku kepentingan (stakeholders). Melakukan pengawasan dan perencanaan manajemen keuangan yang efektif serta memastikan dijalankannya praktik akuntansi sesuai dengan ketentuan dan standar yang berlaku. Memberikan arahan, bimbingan dan strategi dalam mengimplimentasikan fungsi asset liabilities manajemen terkait pengelolaan likuiditas, funding, aset dan liabilitas BPR untuk mencapai target pertumbuhan dan profitabilitas BPR. Menjaga hubungan baik dengan lembaga-lembaga keuangan, nasabah, masyarakat dan pemerintah, untuk memastikan keberlanjutan citra perusahaan, identifikasi			



	antisipatif, dan respon yang cepat untuk memanfaatkan peluang pasar secara optimal.		
2.	Nama	:	Wage Abdi Pradja
	Jabatan	:	Direktur yang menjalankan fungsi kepatuhan
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
	Membawahi satuan kerja sebagai berikut : Satuan Kerja Kepatuhan, Manajemen Risiko & APUPPT. Adapun hal-hal yang berkaitan dengan penerapan fungsi kepatuhan seperti : Menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian, termasuk memberikan pendapat yang berbeda (dissenting opinion) apabila terdapat kebijakan dan/ atau keputusan yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/ atau peraturan perundang-undangan lain, Menetapkan langkah- langkah dalam rangka mendukung terciptanya budaya kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha BPR pada setiap jenjang organisasi, memantau dan menjaga agar kegiatan usaha BPR tidak menyimpang dari peraturan perundang- undangan. Memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lain serta memastikan terlaksananya sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan kepada seluruh unit kerja terkait mengenai peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkini dan peraturan perundang- undangan lain yang relevan dan mencegah Direksi BPR untuk tidak menetapkan kebijakan dan/ atau keputusan yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain. Memberikan arahan strategis, pedoman dan kebijakan manajemen risiko sesuai dengan perkembangan usaha terkini, prinsip kehati-hatian dan berdasarkan pada karakteristik risiko BPR, mengawasi seluruh aspek pertahanan lini kedua (2nd line of defence) BPR dalam fungsi manajemen risiko kredit dan memastikan implementasi yang efektif dari kerangka kerja manajemen risiko kredit BPR yang menyeluruh, serta melakukan review proposal kredit dan menjaga kualitas portofolio kredit, sebagai anggota komite terkait perkreditan, serta memastikan bahwa seluruh kegiatan bisnis telah mematuhi peraturan, kebijakan, dan prosedur yang berlaku.		
3.	Nama	:	Eddy Setiawan Hertanto
	Jabatan	:	Direktur
	Tugas dan Tanggung Jawab :		



Membawahi Pejabat Eksekutif Regional Manager yang membawahi seluruh Kepala Kantor Cabang,

Menetapkan strategi usaha dan memberikan arahan strategis & bimbingan untuk seluruh segmen, produk dan layanan Business Banking, meliputi Financial Institution/ Non-Bank Financial Institution, Corporate, Commercial, dan SME (Small, Medium, Enterprise). Bertanggung jawab untuk mencapai target pendanaan dan pinjaman serta meningkatkan crossselling dalam segmen-segmen tersebut dan dengan cabang, Menetapkan arah produk yang kompetitif. Pengembangan layanan dengan dukungan operasional sesuai tuntutan industri perbankan dan perkembangan teknologi. Bertanggungjawab memastikan sumber daya manusia yang terlibat dalam kegiatan bisnis BPR seperti pada bagian funding dan landing sudah terpenuhi secara memadai dengan menentukan strategi rekrutmen yang tepat.

Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris :

Direksi telah melaksanakan seluruh rekomendasi Dewan Komisaris yang sesuai dengan ketentuan OJK, antara lain pemenuhan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan OJK dan penerapan seluruh ketentuan OJK dengan baik.

Penjelasan Lebih Lanjut :

Direksi melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja dan penurunan NPL secara berkala mencakup pencapaian target sesuai RBB dan penyelesaian kredit bermasalah serta langkah-langkah pembinaan dan pemberian sanksi dengan konsisten setiap awal bulan dengan pemberian target personal kepada pegawai sesuai dengan masing-masing unit kerja.

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris		
1.	Nama	:	Handy Widjaja
	Jabatan	:	Komisaris Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
	Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris. Melakukan panggilan dan memimpin rapat Dewan Komisaris. Menyampaikan laporan pengawasan untuk mendapatkan persetujuan RUPS Tahunan atas pelaksanaan tugas dan pengawasan Dewan Komisaris serta bersama dengan Direktur Utama menandatangani laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif untuk		



	disampaikan kepada OJK.		
2.	Nama	:	Firman Ananda Moeis
	Jabatan	:	Komisaris dan Independen
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
	Selain bersama dengan Komisaris Utama melaksanakan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, tugas dan tanggung jawab sebagai Komisaris Independen adalah sebagai Ketua merangkap Anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko.		
Rekomendasi Kepada Direksi :			
Selama tahun 2023, Komisaris telah memberikan rekomendasi kepada Direksi, antara lain: Direksi agar fokus mengembangkan kultur perusahaan, militansi SDM, perbaikan infrastruktur dan re- branding positioning BPR. Direksi agar monitoring secara ketat seluruh rencana penyelesaian kredit bermasalah sesuai rencana kerja yang telah ditetapkan. Agar Direksi lebih ketat dan berhati-hati dalam menyalurkan kredit baru, serta memonitor seluruh kredit existing, khususnya yang masuk dalam kriteria kredit dalam perhatian khusus, agar seiring dengan program penyelesaian kredit bermasalah. Agar Direksi memenuhi komitmen ke OJK sesuai LHP OJK dan menyampaikan bukti pelaksanaan penyelesaiannya.			
Penjelasan Lebih Lanjut :			
Rapat Dewan Komisaris dilakukan 3 kali tahun 2023			

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite (jika ada)

a. Tugas dan Tanggung Jawab Komite

No.	Tugas dan Tanggung Jawab Komite
1.	Komite Audit
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan, dengan melakukan pemantauan dan evaluasi paling sedikit terhadap: pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Intern, kesesuaian pelaksanaan audit oleh kantor akuntan publik dengan standar audit, kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku bagi BPR, pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan satuan kerja



	audit intern atau pejabat yang menangani audit intern, akuntan publik, dan hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lain. Memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh AP dan/ atau KAP, paling sedikit melalui: kesesuaian pelaksanaan audit oleh AP dan/ atau KAP dengan standar audit yang berlaku, kecukupan waktu pekerjaan lapangan, pengkajian cakupan jasa yang diberikan dan kecukupan uji petik, dan rekomendasi perbaikan yang diberikan oleh AP dan/atau KAP. Selain itu Komite Audit juga mengidentifikasi hal-hal yang menjadi perhatian Dekom, menyusun pedoman dan tata tertib Komite Audit yang harus dievaluasi sesuai kebutuhan atau paling sedikit 3 tahun sekali serta menyusun program kerja komite untuk periode satu tahun dan melaporkan realisasinya kepada Dewan Komisaris dengan tembusan kepada Direktur Kepatuhan.
2.	Komite Pemantau Risiko Tugas dan Tanggung Jawab : Tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko adalah memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dengan paling sedikit melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut. Pemantau Risiko juga memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain memastikan budaya manajemen risiko telah terbangun dengan baik sehingga dapat membatasi terjadinya fraud dan praktek-praktek perbankan yang tidak sehat, mengidentifikasi hal-hal yang berkaitan dengan penerapan manajemen risiko yang membutuhkan perhatian Dewan Komisaris, Membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dalam penerapan manajemen risiko, yaitu: menyetujui kebijakan Manajemen Risiko yang disusun oleh Direksi dengan mempertimbangkan strategi dan kerangka Manajemen Risiko yang ditetapkan sesuai dengan risk appetite dan risk tolerance BPR, serta mengevaluasi kebijakan manajemen risiko paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu)



	tahun atau sewaktu-waktu dalam hal terdapat perubahan yang mempengaruhi kegiatan usaha BPR secara signifikan, Memastikan penerapan Manajemen Risiko oleh Direksi dengan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan manajemen risiko dan memberikan masukan kepada Direksi terkait penyempurnaan penerapan manajemen risiko dalam hal diperlukan, mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi dan memberikan arahan perbaikan atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko, menyusun pedoman dan tata tertib kerja (Piagam) Komite Pemantau Risiko dan melakukan review sesuai kebutuhan atau paling sedikit 3 (tiga) tahun sekali serta menyusun program kerja komite untuk periode satu tahun dan melaporkan realisasinya kepada Dewan Komisaris tembusan kepada Direktorat Kepatuhan.
3.	Komite Remunerasi dan Nominasi
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Tidak ada
Tindak Lanjut Rekomendasi Tugas dan Tanggung Jawab Komite	
Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dibentuk BPR efektif pertanggal 29 Maret 2021. Setiap Rekomendasi tugas dan tanggung jawab Komite telah sepenuhnya dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan program kerja yang dibuat. Setiap Komite mengacu kepada peraturan Otoritas seperti yang terdokumentasi dalam setiap notulen rapat yang rutin dilaksanakan oleh Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko.	



b. Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite

No.	Nama	Keahlian	Jabatan di Komite	Pihak Independen
1.	Dr. Untoro Kayatnan, S.E, M.Sc.	Pihak Independen dengan kompetensi di bidang keuangan	Anggota (Komite Audit) Anggota (Komite Pemantau Resiko)	Iya
2.	Firman A. Moeis	Berkompeten di Bidang Keuangan	Ketua (Komite Audit) Ketua (Komite Pemantau Resiko)	Iya
3.	Ir. Ikun M. Soedrajat, SS.MM, CA PP, CRT	Berkompeten di Bidang Perbankan	Anggota (Komite Audit) Anggota (Komite Pemantau Resiko)	Iya
4.	H. Moh. Nurdin Subandi SE	Berkompeten di Bidang Perbankan	Anggota (Komite Audit) Anggota (Komite Pemantau Resiko)	Iya
Tindak Lanjut Rekomendasi Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite		:	BPR membentuk Komite Audit berdasarkan SK Direksi Nomor 117/ISM/DIR/0321 tanggal 29 Maret 2021, dan membentuk Komite Pemantau Risiko berdasarkan SK Direksi Nomor 115/ISM/DIR/0321 tanggal 29 Maret 2021. Ketua dan anggota masing-masing komite diangkat berdasarkan keahlian masing-masing yang sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan. Ketua dan anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko merupakan pihak independen.	



c. Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite

No.	Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite		
1.	Komite Audit		
	Program	:	Selama tahun 2023, program kerja komite Audit antara lain monitoring laporan keuangan bulanan, penelaahan laporan keuangan dan realisasi RBB triwulanan, penelaahan LHP dan evaluasi RKAT SKAI 2023, penelaahan penerapan pengendalian internal, meriviu laporan pelaksanaan dan pokok hasil audit intern, mengevaluasi laporan khusus temuan yang membahayakan usaha bank, memonitoring tindak lanjut temuan SKAI serta melaksanakan rapat komite.
	Realisasi	:	Program Kerja Komite Audit direalisasikan dalam bentuk rapat dengan anggota Komite bersama dengan Pejabat eksekutif audit intern atau SKAI. Rapat tersebut dilaksanakan minimal 3 bulan sekali dan hasil rapat telah dituangkan dalam risalah rapat Komite Audit dan didokumentasikan dengan baik dan jelas.
	Jumlah Rapat	:	10
2.	Komite Pemantau Risiko		
	Program	:	Program kerja Komite Pemantau risiko selama tahun 2023 antara lain adalah melaksanakan program pemantauan risiko setiap bulannya dengan mengadakan rapat bersama ketua dan anggota Komite pemantau risiko serta melakukan riview laporan keuangan dan non keuangan yang terkait dengan pemantauan risiko di BPR.



	Realisasi	:	Program kerja Komite Pemantau Risiko selama tahun 2023, direalisasikan melalui rapat komite pemantau risiko dan hasil rapat tersebut dituangkan dalam bentuk laporan bulanan untuk kinerja kesehatan laporan keuangan dan non keuangan. Melalui rapat tersebut Komite terus melakukan pemantauan akan hal-hal yang berpotensi menimbulkan risiko yang akan mempengaruhi kelangsungan usaha BPR.
	Jumlah Rapat	:	6
3.	Komite Remunerasi dan Nominasi		
	Program	:	Tidak ada
	Realisasi	:	Tidak ada
	Jumlah Rapat	:	0
Penjelasan Lebih Lanjut			
Tindak lanjut rekomendasi dari setiap program kerja dan realisasi program kerja komite Audit antara lain Komite akan berkelanjutan mengevaluasi dan menyampaikan kepada Direksi setiap kegiatan yang dilakukan di BPR yang berpotensi akan menimbulkan risiko seperti memperhatikan produk-produk kredit termasuk kredit yang direstrukturisasi, dana pihak ketiga yaitu tabungan dan deposito, serta menindaklanjuti setiap temuan audit internal atau SKAI yang berkaitan dengan kegiatan pada BPR. Hal ini telah dituangkan didalam risalah rapat komite Audit dan Komite Pemantau Risiko yang selama tahun 2023 rutin diadakan. Selanjutnya, komite juga diharapkan agar meluangkan waktu untuk melakukan rapat secara langsung atau pertemuan fisik, dikarenakan terdapat beberapa kelemahan yang bisa terjadi pada saat rapat secara online atau telekonferensi seperti gangguan sinyal dan kurang jelas penyampaian yang disampaikan oleh komite atau anggota komite.			



B. Kepemilikan Saham Direksi

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Polycarpus Feriyanto	Rp0	0%
2.	Wage Abdi Pradja	Rp0	0%
3.	Eddy Setiawan Hertanto	Rp0	0%
Penjelasan Lebih Lanjut :			
Anggota Direksi tidak memiliki saham pada PT. BPR Intidana Sukses Makmur			

2. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

No.	Nama Direksi	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Polycarpus Feriyanto	-	-	0%
2.	Wage Abdi Pradja	-	-	0%
3.	Eddy Setiawan Hertanto	-	-	0%
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Anggota Direksi tidak memiliki saham pada Perusahaan lain				

C. Hubungan Keuangan dan/ atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan Anggota Direksi Lain, Anggota Dewan Komisaris dan/ atau Pemegang Saham

1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR



No.	Nama Direksi	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	Polycarpus Feriyanto	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	Wage Abdi Pradja	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
3.	Eddy Setiawan Hertanto	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Anggota Direksi tidak memiliki hubungan Keuangan baik dengan Direksi lain, Dewan Komisaris atau dengan Pemegang Saham.				

2. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	Polycarpus Feriyanto	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	Wage Abdi Pradja	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
3.	Eddy Setiawan Hertanto	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga baik dengan Anggota Direksi yang lain, Dewan Komisaris atau dengan Pemilik Saham.				



D. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris

1. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan Komisaris	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Handy Widjaja	Rp65.000.000.000	80%
2.	Firman Ananda Moeis	Rp0	0%
Penjelasan Lebih Lanjut :			
Saat ini Handy Widjaja sebagai Komisaris Utama sekaligus pemegang saham pengendali dengan jumlah 80% lembar saham dengan nilai nominal Rp.65.000.000.000,-			

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

No.	Nama Dewan Komisaris	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Handy Widjaja	-	-	0%
2.	Firman Ananda Moeis	-	-	0%
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Selain kepemilikan saham pada PT BPR Intidana Sukses Makmur, Handy Widjaja selaku Komisaris Utama saat ini juga memiliki saham pada Restoran A Hwuat sebesar 25%, PT Wahana Bandhawa Kencana sebesar 6%, dimana perusahaan ini bergerak di bidang kontraktor pertambangan batubara. Selain itu, Handy Widjaja juga memiliki saham pada perusahaan yang bergerak di bidang desain interior dan desain furniture yaitu PT. Versaguna International sebesar 10%.				

E. Hubungan Keuangan dan/ atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Dewan Komisaris Lain, Anggota Direksi dan/ atau Pemegang Saham BPR



1. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris Lain	Pemegang Saham
1.	Handy Widjaja	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	Abdul Salam	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
3.	Firman Ananda Moeis	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Tidak terdapat hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR.				

2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris Lain	Pemegang Saham
1.	Handy Widjaja	Tidak ada	Tidak ada	Yamin Widjaja - Paman
2.	Abdul Salam	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
3.	Firman Ananda Moeis	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Handy Widjaja sebagai salah satu anggota Dewan Komisaris memiliki hubungan keluarga dengan pemegang saham lainnya yaitu Yamin Widjaja, yakni sebagai paman.				



F. Paket/ Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

1. Paket/ Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No.	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1.	Gaji	3	Rp1.266.000.000	3	Rp1.233.000.000
2.	Tunjangan	3	Rp528.000.000	3	Rp337.000.000
3.	Tantiem	3	Rp149.750.000	3	Rp89.250.000
4.	Kompensasi Berkas Saham	0	Rp0	0	Rp0
5.	Remunerasi Lainnya	0	Rp0	0	Rp0
Total			Rp1.943.750.000		Rp1.659.250.000
Penjelasan Lebih Lanjut :					
Paket/Kebijakan Remunerasi terbaru bagi Direksi dan Komisaris yang ditetapkan dalam RUPS adalah gaji pokok, tunjangan-tunjangan dan tantiem, dimana hal ini telah dibahas dalam Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 13 September 2023.					



2. Uraian Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No.	Jenis Fasilitas Lain (Dalam 1 Tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1.	Perumahan	Tidak ada	Tidak ada
2.	Transportasi	Mobil Dinas (3)	Mobil Dinas (1)
3.	Asuransi Kesehatan	Asuransi Kesehatan (3)	Asuransi Kesehatan (2)
4.	Fasilitas Lainnya	Perangkat Telepon Selular (3)	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :			
Direksi dan Dewan Komisaris saat ini mendapatkan fasilitas berupa mobil dinas, asuransi kesehatan dan perangkat telepon selular.			

G. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

Keterangan	Perbandingan
	(a/b) : 1
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	7.01 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1.26 : 1
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	3.2 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)	0.72 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b)	1.77 : 1
Penjelasan Lebih Lanjut :	
Gaji yang dimaksud merupakan gaji keseluruhan yang diterima mencakup gaji pokok dan tunjangan 1 tahun.	



H. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

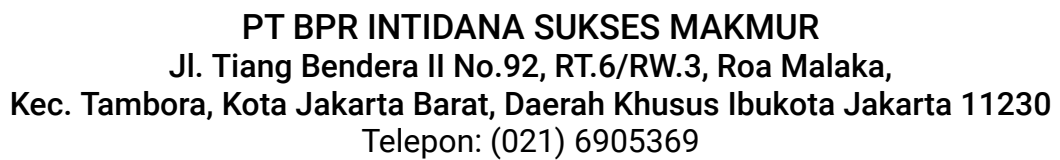
1. Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) tahun

No.	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1.	10 Januari 2023	5	Rapat Rutin Direksi, Perubahan Struktur Organisasi & Pembagian Tugas Tanggung Jawab Direksi
2.	25 Oktober 2023	10	Pembahasan Tentang Penurunan dan Penanganan NPL
3.	02 November 2023	12	Rapat Efektivitas Cost Of Fund dan Presentasi Bisnis Model
4.	08 November 2023	39	Meeting Pre Budgeting 2024
5.	15 November 2023	7	Meeting Evaluasi Rencana Bisnis BPR (RBB)
6.	22 November 2023	12	Meeting Pembahasan Profil Risiko, Tingkat Kesehatan Bank & Portofolio Review
7.	05 Januari 2023	6	Rencana & Strategi masing2 Direktorat, NPL (Tong 2 : 130 M)
8.	09 Oktober 2023	9	Performance Highlight, Pemenuhan SDM, Strategy & Continuous Improvement
9.	13 Desember 2023	12	Tindak Lanjut Penanganan Account Berkualitas Rendah & NPL
10.	07 Desember 2023	9	Rencana Kerja 2024 Terkait Penanganan Account Berkualitas Rendah & NPL
Penjelasan Lebih Lanjut Pelaksanaan Rapat dalam 1 tahun :			
Selama tahun 2023, rapat dewan komisaris dilaksanakan selama 10 kali dan hasil rapat tersebut dituangkan dalam risalah rapat dan selalu didokumentasikan dengan baik dan jelas. Dewan komisaris bersama Direksi berfokus dalam pengawasan yang lebih ketat khususnya dapat penyelesaian setiap permasalahan yang dihadapi BPR, termasuk dalam pengawasan terhadap penyelesaian kredit bermasalah yang sangat berpotensi menimbulkan risiko pada usaha BPR.			

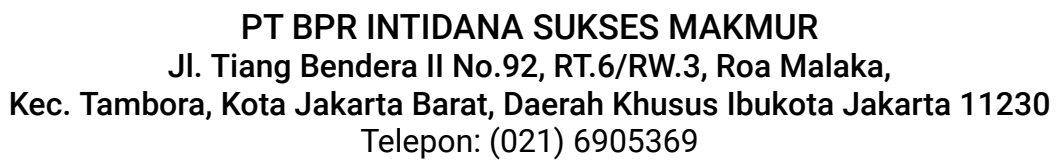


2. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

No.	Nama Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
		Fisik	Telekonferensi	
1.	Handy Widjaja	5	1	100%
2.	Firman Ananda Moeis	4	2	100%
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Selama tahun 2023, Rapat Anggota Dewan Komisaris dilaksanakan pertemuan secara fisik. Kedua anggota Dewan Komisaris selalu menghadiri Rapat Dewan komisaris yang diadakan secara lengkap.				



Jumlah Penyimpangan Internal*) (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus (Satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelum nya	Tahun Laporan	Tahun Sebelum nya	Tahun Laporan	Tahun Sebelum nya	Tahun Laporan	Tahun Sebelum nya	Tahun Laporan
Total Fraud	0	0	0	0	1	0	0	0
Telah Diselesaikan		0		0		0		0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0	0	0	0	0	0	0
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum		0		0		0		0
Penjelasan Lebih Lanjut :								
Penyimpangan Internal atau Fraud yang terjadi selama tahun 2023 tidak ada tindaklanjut dan indikasi fraud.								



Permasalahan Hukum	Jumlah (Satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai	6	0
Dalam Proses Penyelesaian	2	0
Total	8	0

Penjelasan Lebih Lanjut

Selama tahun 2022, terdapat 8 masalah hukum yang dihadapi oleh BPR Intidana Sukses Makmur. Salah satu permasalahan hukum yang dihadapi adalah terkait penolakan salah satu debitur terhadap pelelangan agunan yang dijaminakan kepada BPR Intidana Sukses Makmur. Masalah hukum ini telah selesai karena telah resmi ditutup oleh pengadilan. Saat ini masih ada 2 permasalahan hukum yang masih berlanjut di pengadilan. Adapun masalah hukum tersebut adalah penolakan pelelangan agunan dan adanya pihak penggugat yang mengklaim sebagai pemilik agunan yang dijaminakan oleh debitur kepada BPR Intidana Sukses Makmur.

No.	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan		Pengambil Keputusan		Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
	Nama	Jabatan	Nama	Jabatan			
1.							
2.							
3.							
Penjelasan Lebih Lanjut : Selama tahun 2023, tidak terdapat Transaksi yang mengandung Benturan Kepentingan.							



L. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

No.	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/ Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
1.	02 Januari 2023	Sosial	Bantuan seragam	RW 03/11 KPO Tiang Bendera, Jakarta Barat	Rp200.000
2.	12 April 2023	Sosial	Santunan anak yatim	Anak yatim Kelurahan Roa Malaka	Rp300.000
3.	01 Agustus 2023	Sosial	Bantuan HUT RI KPO	RT 05 RW 03 KPO	Rp300.000
4.	08 Agustus 2023	Sosial	Bantuan HUT RI KC MATRAMAN	RT 08 RW 04 KC Matraman	Rp100.000
5.	17 April 2023	Sosial	Sumbangan dalam rangka hari raya Idul Fitri	Tokoh masyarakat dekat lokasi BPR	Rp2.491.950
6.	17 April 2023	Sosial	Sumbangan dalam rangka hari raya	Tokoh masyarakat dekat lokasi BPR	Rp2.491.950
Penjelasan Lebih Lanjut Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik					
Selama tahun 2023, BPR tidak melakukan pemberian dana terkait dengan Kegiatan Politik. BPR melakukan pemberian dana hanya untuk kegiatan sosial yang telah diuraikan sebelumnya.					